

DITERIMA DARI ..BAWASLU.....	
NOMOR 20.01.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.20 WIB

DITERIMA DARI ..Bawaslu.....	
NOMOR 170.04.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.20 WIB

DITERIMA DARI ..Bawaslu.....	
NOMOR 203.11.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.20 WIB

DITERIMA DARI ..Bawaslu.....	
NOMOR 243.06.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.20 WIB

DITERIMA DARI ..Bawaslu.....	
NOMOR 250.00.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.20 WIB

DITERIMA DARI ..Bawaslu.....	
NOMOR 42.13.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.20 WIB

Jayapura , 5 Juli 2019

Nomor : 215/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.06.01/VII/2019  
Lampiran : 1 Bundel  
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Papua terkait  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR RI, DPD,  
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun  
2019

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

Sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA**

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan ... rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**

1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan

1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua;

**(Bukti Pk.34 -1)**

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; **(Bukti Pk.34 -1)**

1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.

- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
  - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 - 2**)
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
- 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (**Bukti Pk.34.12 -1**)
  - 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang

disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (**Bukti Pk.34.12 -2**)

- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; (**Bukti Pk.34 -3**)
- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
  - 1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan

- 1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
- 1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
- 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)
- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara

dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;

1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)

1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)

1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;

1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu

DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.

- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
  - 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
  - 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (**Bukti Pk.34 - 5**)
  - 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor **07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019** terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor **07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019** yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34.1 -1**)
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-**



**Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34 -7)**

- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada

formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;

- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyangdingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -10**)
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;

- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak

mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)

- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta

KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo;  
**(Bukti Pk.34 -14)**

- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan;  
**(Bukti Pk.34 -15)**
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;

- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019**

**tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; **(Bukti Pk.34 -17)**

- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; **(Bukti Pk.34 -18)**
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; (**Bukti Pk.34 -20**)

1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (**Bukti Pk.34 -21**)

1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (**Bukti Pk.34 -22**)

1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (**Bukti Pk.34 -23**)

## **B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

### **1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD**

#### **1.1 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 07-33 atas nama Carel Suebu**

1.1.1 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.1.1) yang menyebutkan formulir **model DB1 DPD untuk Kabupaten Puncak** tidak diberikan kepada saksi



dan materil laporan; (*Bukti PK.34.21-44*)

- Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terhadap laporan yang diajukan oleh sdr. Welson Airon Wenda tidak disertai bukti-bukti yang dapat membuktikan dan menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang dimaksudkan;
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura sudah melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan oleh sdr. Welson Airon Wenda dengan hasil dikeluarkannya Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh sdr. Welson Airon Wenda tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan: Pelapor belum menyampaikan identitas dan alamat Terlapor secara jelas; dan bukti yang dilampirkan oleh Pelapor tidak menerangkan dan membuktikan adanya pelanggaran seperti yang dimaksudkan; (*Bukti PK.34.21-45*)

## 2.16 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 243.06.33

### 2.16.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- 2.16.1.1 Berdasarkan dalil pemohon (IV.2 point 1) yang menyebutkan bahwa tidak adanya Proses Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Distrik khususnya Kampung Kebun Sirih, Printis, Timika Indah, Sempan, Dingo Narama, Pasar Sentral, dan desa lainnya yang pada intinya terfokus pada Distrik Mimika Baru, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Distrik Mimika Baru yang dilaksanakan pada tanggal 20 April sampai dengan 09 Mei 2019 terhadap pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik yang mana dari hasil rekapitulasi tersebut PPD Distrik Mimika Baru memberikan Salinan DA1-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2 kepada Pengawas Pemilu; (*Bukti PK-34-24-33*)
  - b. Bahwa terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik di Distrik Mimika Baru, Bawaslu Kabupaten Mimika telah melaksanakan supervisi terkait Pelaksanaan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilu di Distrik Mimika Baru yang dilaksanakan pada Tanggal 23 April sampai dengan 28

April, yang pada intinya adalah Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Distrik untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Mimika Baru telah dilaksanakan; (*Vide Bukti PK-34-24-34*)

2.16.1.2 Berdasarkan dalil Pemohon yang menyebutkan Bahwa terhadap rekapitulasi Perhitungan suara di semua wilayah Papua di rekomendasikan untuk dilakukan PSU termasuk wilayah Kabupaten Jayawijaya pada tingkat Provinsi Papua, sebagaimana surat bawaslu tertanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Propinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019. Yang pada pokoknya mengeluarkan perintah dilakukan PSU di beberapa daerah termasuk Kabupaten Mimika, Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap Rekomendasi Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Papua.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, yang mana Rekomendasi tersebut dari Bawaslu Provinsi Papua yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua atas penyampaian hasil rekapitulasi dari

KPU Kabupaten Tolikara; (*Bukti PK-34.24-35*)

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2019, bertempat di Grand Abe Hotel Jayapura; (*vide Bukti PK-34.24-31*)
- c. Bahwa dalam rapat pleno tersebut, terhadap penyampaian hasil rekapitulasi perolehan suara yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Mimika, dan atas beberapa keberatan dari saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 094/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 dan di tujukan kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya adalah:
  - Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Mimika diskors dan dilakukan Pembetulan;
  - Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Mimika untuk melakukan pembetulan sesuai dengan data yang telah disandingkan oleh Saksi

Partai Politik dan KPU Kabupaten  
Mimika; (*vide Bukti PK-34-24-32*)

- 2.16.1.3 Berdasarkan dalil pemohon (hal 8) yang menyebutkan bahwa Pemohon memiliki bukti di dapil Jayawijaya 2 sebesar 8.692, namun perhitungan di tingkat PPD suara pemohon dikurangi. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Hasil Perolehan Partai Garuda pada Dapil I Kabupaten Jayawijaya

No	Nomor Urut Partai	Distrik			
		Wamena	Wesaput	Wouma	Napua
	6 Partai Garuda	25	0	0	0
1	Hengki Meage	40	0	5210	0
2	Johny Kogoya, SP	277	41	0	0
3	Maria Defota Tekege, SE	8	0	0	0
4	Amanus Dabi, S.Sos	12	0	0	0
5	Yohana Matuan	17	0	0	0
6	Ruben Yando	889	55	0	0
7	Fransina Elokpere	1	1	0	0
8	Martinus Itlay	237	1373	0	500
<b>TOTAL</b>		<b>1506</b>	<b>1470</b>	<b>5210</b>	<b>500</b>

(Bukti PK.34-23. 101)

- b. Keterangan berdasarkan surat Bawaslu tertanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua telah

mengeluarkan Rekomendasi Nomor :  
097/K.Bawaslu-

Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14  
Mei 2019, yang pada pokoknya  
mengeluarkan perintah dilakukan  
PSU;

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan  
Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.  
Bawaslu Provinsi Papua, tidak pernah  
merekomendasikan untuk dilakukan  
PSU terhadap KPU Kabupaten  
Jayawijaya dengan Nomor :  
097/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14  
Mei 2019; (*Bukti PK-34-23. 102*)
- d. Keterangan pemilu di Kabupaten  
Jayawijaya hanyalah untuk pemilihan  
calon anggota DPRD Kabupaten  
Jayawijaya dengan sistem noken;
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan  
Bawaslu Kabupaten Jayawijaya,  
pemilu dilaksanakan di Kabupaten  
Jayawijaya dengan dua System :
  - System Nasional dilaksanakan di  
Distrik Wamena, Kelurahan  
Wamena Kota, Kelurahan Sinakma  
dan Kelurahan Sinapuk;
  - System Noken boleh dilaksanakan  
selain 3 (Tiga) kelurahan di Distrik  
Wamena; dan

- Keterangan Bukti DB1 milik pemohon juga menjelaskan suara milik pemohon sebesar 3590 suara.

Keterangan Undangan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor:100/UND/B8/V/2019 Perihal Rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 11 Mei 2019;

- f. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, KPU Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 12 Mei 2019 di Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya; (*Bukti PK-34-23.103*)
- g. Bahwa Keterangan Rapat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayawijaya terdapat beberapa keberatan yang disampaikan saksi Pelapor menggunakan Form DB2 KPU. Kemudian Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi Nomor 132/K.BAWASLU-JYW/PM.03.01/V/2019, Tertanggal 9 Mei 2019. KPU menindak Lanjuti dengan nomor surat No.97/B2/KPU.KAB.030/V/2019 perihal undangan Kegiatan Koreksi

hasil Pemilu, namun perbaikan tersebut tidak dilakukan dan saksi parpol tidak di ikut sertakan atau di undang;

- h. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Tingkat KPU Kabupaten Jayawijaya, beberapa saksi dari partai politik melakukan keberatan sehingga hal tersebut, Bawaslu Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor:132/K.BAWASLUJYW/PM.03.01/V/2019, Tertanggal 9 Mei 2019, untuk melakukan perbaikan nilai perolehan suara terhadap distrik – distrik yang melakukan keberatan sebagaimana dalam rekomendasi tersebut. (*BuktiPK-34-23. 104*)
- i. Bahwa Keterangan berdasarkan laporan Saudara Games Wanimbo melaporkan kecurangan di beberapa distrik diantara sebagai berikut: Distrik, Kurulu, Distrik Witawaya, Distrik Libarek, DistrikWame, Distrik Hubikiak, Distrik Muliama, Distrik Asologaima, Distrik Piramid, Distrik Asologaima, Distrik Walelagama;
- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya laporan atas nama Games Wanimbo telah d iterima dari Bawaslu Provinsi Papua Melimpah Ke Bawaslu



Kabupaten Jayawijaya, namun laporan tersebut tidak dapat ditindaki karena memenuhi syarat formil dan syarat materil sudah daluarsa;

- k. Bahwa berdasarkan hasil laporan saksi pemohon ke bawaslu Provinsi Papua tersebut, Bawaslu kemudian memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang pemohon sebut pada dalil di atas;
- l. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu Kabupaten Jayawijaya tidak pernah mendapati Bawaslu Provinsi memerintahkan atau Bawaslu Kabupaten Jayawijaya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa Distrik sebagaimana dalil pemohon;
- m. Bahwa hasil rekapitulasi suara di tingkat Distrik Wame sesuai dengan C1 dan Data DAA1 partai garuda mendapat perolehan suara sebesar 1720 suara;
- n. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya bersama jajaran Pangawas Distrik, PPL, Pengawas TPS maka hasil perolehan suara partai Garuda sebagai berikut :

Hasil Perolehan Partai Gerakan Perubahan Indonesia pada Distrik Wame

No	Nama Caleg DPR	Distrik Wame			
		Dogoname	Dumapaga	Wame	Yanenggame
<b>6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia</b>		0	0	0	0
1	Agustinus Mabel, Amd.Par	0	0	0	0
2	Muel Kogoya, S.I. Kom	22	0	0	0
3	Fransina Mabel	0	0	0	0
4	Yope Wenda, S.H	38	22	50	0
5	Otopina Wantik	0	0	0	0
6	Jemat Itlay	0	0	0	0
7	Sonya Walilo	0	0	0	0

(Bukti PK.34-23. 105)

- o. Bahwa Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya suara dari caleg partai demokrat dan caleg dari partai PKPI diduga terjadi pengelembungan, dan suara sengaja diberikan kepada partai demokrat yang tadi diatas 1095 atas nama Ana Mabel Caleg partai Demokrat no urut 2 Dapil Jayawijaya dan Caleg dari Ibu Sender Morin dari partai PKPI nomor urut 1 yang diduga suara terjadi pengelembungan sehingga menjadi 1084 suara;
- p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya bersama jajaran Panwas Distrik, PPL,

dan Pengawas TPS tidak pernah menemukan atau menerima laporan terhadap dalil pemohon;

- q. Keterangan akibat Rapat Pleno Distrik Wame suara Partai Garuda berkurang sebesar 1072 suara atas nama Yope Wenda Caleg hilang;
- r. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pangawas Distrik Wame Kabupaten Jayawijaya, pada Pleno Distrik Wame sebagai berikut:

No	Nama Caleg DPR	Distrik Wame			
		Dogoname	Dumapaga	Wame	Yanenggame
<b>6 Partai Gerakan Perubaha Indonesia</b>		0	0	0	0
1	Agustinus Mabel, Amd.Par	0	0	0	0
2	Muel Kogoya, S.I. Kom	22	0	0	0
3	Fransina Mabel	0	0	0	0
4	Yope Wenda, S.H	38	22	50	0
5	Otopina Wantik	0	0	0	0
6	Jemat Itlay	0	0	0	0
7	Sonya Walilo	0	0	0	0

- s. Keterangan bahwa pemohon juga memiliki bukti di dapil 3 sebesar 3659 sesuai data pemohon yakni data DB1, oleh perhitungan tingkat Distrik/PPD mengurangi suara pemohon.

### Dapil 3

Hasil Perolehan Partai Gerakan Perubahan Indonesia Dapil 3  
Kabupaten Jayawijaya.

No	Nama Caleg DPR	Distrik				
		Bolakme	Yalengga	Wolo	Usilimo	Koragi
<b>6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia</b>		0	0	0	0	0
1	Tinus Tabuni	0	0	0	0	0
2	Manto Tabuni	693	0	0	0	0
3	Yusmina Tabuni	0	0	0	0	0
4	Tab Tabuni	0	0	0	0	0
5	Tinus Karoba	0	0	0	0	966
6	Tiben Wenda	0	0	0	0	0

No	Nama Caleg DPR	Distrik				
		Tagime	Molagalome	Tagineri	Bugi	Bripi
<b>6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia</b>		0	0	0	0	0
1	Tinus Tabuni	0	0	0	0	0
2	Manto Tabuni	0	0	0	0	0
3	Yusmina Tabuni	0	0	0	0	0
4	Tab Tabuni	2000	0	0	0	0
5	Tinus Karoba	0	0	0	0	0
6	Tiben Wenda	0	0	0	0	0

(Bukti PK.34-23. 106)

- t. Keterangan pemohon mempunyai bukti di dapil 4 sebesar 3781, namun oleh perhitungan distrik di tingkat PPD suara pemohon di kurangi

#### Dapil 4

#### Hasil Perolehan Suara Partai Gerakan Perubahan Indonesia Dapil 4 Kabupaten Jayawijaya

No	Nama Caleg DPR	Distrik						
		Asolo kobal	Walela gama	Pele Baga	Trikora	Walaik	Ibele	Taelar ek
<b>6 Partai Gerakan Perubaha Indonesia</b>		0	0	0	0	0	0	0
1	Philipus Asso	122	0	0	0	0	0	0
2	Franciskus Isak Huby	0	0	0	0	0	0	0
3	Debora Haluk	0	0	0	0	0	0	0
4	Yoel Haluk, S.Th	0	0	0	0	0	0	0
5	Naomi Hisage	0	0	0	0	0	0	0
6	Yulia Walilo	0	0	0	0	0	0	0
7	Domius Meaga	0	0	3104	0	0	0	0
8	Harun Mosip	0	0	0	0	0	0	15
9	Peleng Kossay, A.Md	0	0	0	0	0	0	0

No	Nama Caleg DPR	Distrik					
		Itlay Hisage	Siepkosi	Welesi	Asotipo	Maima	Popugoba
<b>6 Partai Gerakan Perubaha Indonesia</b>		0	0	0	0	0	0
1	Philipus Asso	0	0	0	0	0	0

2	Franciskus Isak Huby	0	0	0	0	0	0
3	Debora Haluk	0	0	0	0	0	0
4	Yoel Haluk, S.Th	0	329	0	0	0	0
5	Naomi Hisage	0	148	0	0	0	0
6	Yulia Walilo	0	0	0	0	0	0
7	Domius Meaga	0	0	0	0	0	0
8	Harun Mosip	0	0	0	0	0	0
9	Peleng Kossay, A.Md	0	53	0	0	0	0

(Bukti PK.34-23. 107)

2.16.1.4 Berdasarkan dalil pemohon (hal 8) yang menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01./V/2019 tanggal 14 Mei 2019. yang pada pokoknya memerintah untuk dilakukan PSU dan Pemilu di Kabupaten Asmat hanya untuk DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan system Noken serta selisih suara dari TPS 01 dan TPS 03 di kampung Bismam. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, Partai Garuda memperoleh 4 suara di TPS 03 dan di TPS 01 suara partai sebanyak 5 suara sesuai dengan blangko C1. Namun pada saat pleno rekapitulasi di tingkat PPD menjadi 1 suara seperti yang tertera dalam formulir DA1 dan Bawaslu Kabupaten Asmat

menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pencermatan Bawaslu Asmat terhadap Rekomendasi Bawaslu Provinsi nomor 097/K.Bawaslu- Prov.Pa/PM.00.01.V/2019 bertanggal 14 Mei 2019, yang pada pokoknya menunda penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten untuk kabupaten Puncak Jaya dan meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan penyandingan Data dan melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh saksi partai, saksi DPD, KPU Kabupaten Puncak Jaya , dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya; (*Bukti PK-34.29. Rekomendasi 097*)
- b. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Asmat terhadap pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Asmat telah dilaksanakan secara demokratis. Ada pun TPS yang melaksanakan Pemilihan sebagaimana dalam dalil Pemohon, Bawaslu sudah merekomendasikan kepada KPU kabupaten Asmat untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang. Terhadap Rekomendasi PSU tersebut KPU

sudah menindaklanjutinya yang dilaksanakan pada tanggal 27 April tahun 2019; (*Bukti PK-34.29*)

- c. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu distrik Agats terhadap penghitungan suara di TPS 01 dan TPS 03 di kampung Bismam sesuai dengan formulir C1 DPDR Kab/Kota adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara	
		TPS 01	TPS 03
	<b>Partai Garuda</b>		4
1.	Marthen Desnam, Amd. Tek		0
2.	Polikarpus Owom		0
3.	Margereta Pombai		0
4.	Falentinus Desnam, SH		0
5.	Rufus Kora Tenember, Am, Pd		0
6.	Mardalena Erro		0
7.	Elias Ewer		137
8.	Porman Munthe		0
9.	Webi Sonya Yakairem, SE		0
10.	Salfatorius Rafra		0
11.	Arlenci Marbase, S.Pd		0



<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik</b>	
--	--

(Bukti PK-34.29. C1 bismam)

- d. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Rekapitulasi Hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 06 Mei 2019 Distrik Agats sesuai DA1 kab./kota adalah sebagai Berikut:

<b>Kampung Bismam Distrik Agats Asmat 1</b>		
<b>No</b>	<b>Nama Partai dan Calon</b>	<b>Perolehan suara</b>
	<b>Partai Garuda</b>	1
1.	Marthen Desnam, Amd. Tek	0
2.	Polikarpus Owom	0
3.	Margereta Pombai	0
4.	Falentinus Desnam, SH	1
5.	Rufus Kora Tenember, Am, Pd	0
6.	Mardalena Erro	1
7.	Elias Ewer	219
8.	Porman Munthe	7
9.	Webi Sonya Yakairem, SE	1
10.	Salfatorius Raфра	0

11.	Arlenci Marbase, S.Pd	0
<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik</b>		230

(Bukti PK-34.29. DA1)

- e. Bahwa berdasarkan data DB1 yang diserahkan oleh KPU kepada Bawaslu Asmat setelah penetapan pada tanggal 12 Mei 2019, perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

<b>Asmat 1 Distrik Agats</b>		
<b>No</b>	<b>Nama Partai dan Calon</b>	<b>Perolehan suara</b>
	<b>Partai Garuda</b>	51
1.	Marthen Desnam, Amd. Tek	127
2.	Polikarpus Owom	108
3.	Margereta Pombai	117
4.	Falentinus Desnam, SH	183
5.	Rufus Kora Tenember, Am, Pd	0
6.	Mardalena Erro	18
7.	Elias Ewer	243
8.	Porman Munthe	48
9.	Webi Sonya Yakairem, SE	30
10.	Salfatorius Rafra	7
11.	Arlenci Marbase, S.Pd	1

(Bukti PK-34.29. DB1)

2.16.1.5 Berdasarkan dalil pemohon (hal 11) bahwa telah ditemukan kejadian yang dapat dianggap sebagai kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif di Kabupaten Yahukimo. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Yahukimo melakukan pengawasan pleno rekapitulasi di tingkat provinsi yang mana bawaslu provinsi mengeluarkan rekomendasi nomor : 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang pada inti surat tersebut yaitu :
  - Hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang akan di sampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo, di tunda penetapan;
  - Meminta agar KPU Provinsi Papua Memerintakan KPU Kabupaten Yahukimi untuk menyerahkan salinan Formulir DA-KPU, DA 1 PPWP, DA 1 DPR, DA 1 DPD, DA 1 DPRD PRV, DA 1 DPRD Kabupaten, dan DA 2-KPU dari masing-masin PPD kepada bawaslu kabupaten Yahukimo dan saksi;
  - Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintakan KPU Kabupaten Yahukimo Untuk melaksanakan

rekapitulasi hasil perhitungan prolehan suara berdasarakan DA 1 PPWP, DA 1 DPR, DA 1 DPD, DA 1DPR Provinsi paling lambat 2 x 24 JM sejak rekomendasi dikeluarkan.

**Bukti PK34.26-62.**

- b. Bahwa sesudah melakukan penyandingan data KPU Kabupaten membacakan hasil perolehan suara di DPRD Provinsi, DPD, DPR, dan PPWP. terhadap dalil pemohon yang menyebutkan bahwa yang menggunakan system noken hanya lah DPRD Kabupaten Yahukimo melakukan pengawasan bahwa sesuai dengan surat keputusan pemilihan umum nomor 810/PL.02.6 KPt/06/KPU/IV/2019 tentang pelaksanaan pemungutan suara dengan system Noken/ikat di Provinsi Papua dalam pemilihan Umum tahun 2019 kabupaten Yahukimo termasuk salah satau kabupaten yang menggunakan system noken/ikat.
- c. Bahwa sesuai dengan lampiran surat keputusan pemilihan umum nomor 810/PL.02.6 KPt/06/KPU/IV/2019 tentang pelaksanaan pemungutan suara dengan system Noken/ikat yaitu Kabupaten Yahukimo seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/ikat

kecuali di Distrik Dekai; (*Bukti PK34.26. 63*)

- d. Bahwa sesuai dengan Dalil Pemohon caleg an Zebulon Yohame ,ST partai GARUDA DPRD Kabupaten yang menyebutkan bahwa pemohon mendapatkan suara 923 suara di Tingkat Distrik Anggruk namun pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Yahukimo perolehan suara pemohon hilang dan diduga PPD mengalihkan suara ke partai NASDEM an Yance Lintamon nomor urut 4 (empat) calon DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 2. Bahwa berdasarkan dalil pemohon bawaslu Kabupaten Yahukimo melaporkan hasil pengawasan sebagai berikut;
- e. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik Anggruk dilaksanakan pada tanggal `18 april 2019 yang di hadiri oleh Saksi Parpol dan masyarakat. Adapun perolehan hasil pemohon dari partai garuda adalah sebagai berikut :

No	Caleg Partai GARUDA	Perolehan suara	Caleg Partai NASDEM	Perolehan Suara
1	Zebulon Yohame	0	Esau Miram	0
2	Hendrik Kenanggalem	0	Yafet Saram	0
3	Hana B Pahabol	0	Eretina Yual	0

4	Yuarina Tibul	0	<b>Yance Ilintamon</b>	<b>3,460</b>
5	Johanes Taes	0	Ema Iryouw	0
6	Nataniel Kepno	0	Alle Salak	0

(Bukti PK34.26. 64)

2.16.1.6 Bahwa berdasarkan Dalil pemohon (hal 12) bahwa terjadi selisih suara antara DPT sebanyak 59.993 suara dan yang di DA1 sebesar 58.666. suara tidak sah Nol, sehingga ada selisih 1.327 suara. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal berikut sebagai Berikut:

- a. Bahwa bawaslu Kabupaten Nabire melakukan pengawasan terhadap salinan berita acara rekapitulasi di tingkat distrik (DA1-KWK) dimana jumlah DPT Distrik Nabire yang di muat dalam salinan DA1-KWK berjumlah 59.993 suara dan surat suara yang di terima di tambah 2% berjumlah 61.185, jumlah surat suara yang tidak di gunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 2.519 surat suara dan jumlah surat suara yang terpakai 58.666 sehingga tidak terdapat selisih surat suara;  
(Bukti.PK.34.2-07)
- b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyebutkan bahwa terjadi penggelembungan suara partai

Demokrat 1.084 suara sehingga suara keseluruhan Partai Demokrat 3.130 suara. Bawaslu Provinsi Papua melakukan pengawasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire melalui Panwas Distrik Nabire pelaksanaan rekapitulasi di tingkat distrik dilaksanakan pada 7 Mei 2019 yang dilaksanakan di gedung Gashose jl. Merdeka Nabire yang di hadiri oleh Saksi Parpol dan Panwas Distrik Nabire dimana rekapitulasi tersebut di bacakan berdasarkan jumlah suara perpartai politik. Bahwa dari hasil pengawasan Panwas Distrik Nabire prolehan hasil untuk DPRD Nabire Dapil 2 untuk Partai Demokrat adalah sebagai berikut :

**Perolehan suara Demokrat perkelurahan/kampung**

<b>N O</b>	<b>NAMA KELURAHAN/KAMPU NG</b>	<b>PEROLEH AN SUARA</b>
1.	Kalibobo	426
2.	Morgo	395
3.	Oyehe	177
4.	Nabarua	789

5.	Siriwini	1082	
6.	Sanoba	261	

**PK.34.2-08**

2.16.1.7 Berdasarkan dalil pemohon yang menyebutkan pemohon memperoleh suara di distrik Bruwa sebanyak 4.556 suara, namun pada DB1-DPRD Kabupaten pemohon mengalami pengurangan suara hingga 8 suara, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Distrik Bruwa, rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019; (*vide Bukti PK-34.15-41*)
- b. Bahwa dalam rekapitulasi tersebut dilakukan berdasarkan C1 dari masing-masing TPS; untuk selanjutnya direkap kedalam DA1 disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, dengan rincian sebagai berikut:

PARTAI POLITIK		Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPRD Distrik Bruwa Hasil Pengawasan
1.	PKB	
2.	GERINDRA	



3.	PDI Perjuangan	
4.	GOLKAR	
5.	NASDEM	
6.	GARUDA	0
7.	BERKARYA	
8.	PKS	
9.	PERINDO	
10.	PPP	
11	PSI	
12	PAN	
13	HANURA	
14	DEMOKRAT	
19	PBB	
20	PKPI	

(vide Bukti PK-34.15-25)

- c. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pelaksanaan rekapitulasi untuk Distrik Bruwa ditingkat Kabupaten Lanny Jaya, dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019, di Aula Nirimok, Tiom; (Bukti PK-34.15-04)
- d. Bahwa dalam rekapitulasi tersebut dilakukan berdasarkan DA1-DPRD yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Bruwa yang kemudian direkap kedalam DB1-DPRD, dengan rincian sebagai berikut:

PARTAI POLITIK		Perolehan Suara berdasarkan DB1-DPRD untuk Distrik Bruwa Hasil Pengawasan
1.	PKB	
2.	GERINDRA	
3.	PDI Perjuangan	
4.	GOLKAR	
5.	NASDEM	
6.	GARUDA	0
7.	BERKARYA	
8.	PKS	
9.	PERINDO	
10.	PPP	
11	PSI	
12	PAN	
13	HANURA	
14	DEMOKRAT	
19	PBB	
20	PKPI	

(Bukti PK-34.15-50)

e. Berdasarkan dalil pemohon yang menyebutkan adanya Keputusan Badan Pengawas Pemilu Distrik Bruwa Kabupaten Lanny Jaya yang

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Papua ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah di setujui dan di putuskan dalam Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**



**METUSALAK INFANDIS**

**ANGGOTA**

**AMANDUS SITUMORANG, SH.,MH**

**ANGGOTA**

**JAMALUDDIN LADO RUA, SH.,MH**

**ANGGOTA**

**TJIPTO WIBOWO, S.Pd.,M.Si**

**ANGGOTA**

**NIKO TUNJANAN, SS**

**ANGGOTA**

**RONALD MANOACH, ST**

**ANGGOTA**

**ANUGRAH PATA, SH**

Kode Klasifikasi Bukti	Keterangan
<b>PROVINSI PAPUA</b>	
PK.34 -1	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -2	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -3	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -4	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -5	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -6	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -7	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -8	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -9	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -10	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -11	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -12	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -13	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -14	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

PK.34 -15	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01V/2019
PK.34 -16	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01V/2019
PK.34 -17	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01V/2019
PK.34 -18	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01V/2019
PK.34 -19	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01V/2019
PK.34 -20	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01V/2019
PK.34 -21	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01V/2019
PK.34 -22	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01V/2019
PK.34 -23	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01V/2019
PK.34 -24	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk pembacaan Kabupaten Kepulauan Yapen
PK.34 -25	Surat Keputusan KPU Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan system noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
PK.34 -26	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk penyandingan data Kabupaten Yahukimo

PK.34 -27	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk kedatangan KPU Kabupaten Tolikara
PK.34 -28	Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua terkait Logistik Pemilu Kabupaten Tolikara pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua
PK.34 -29	Surat Pelimpahan Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Papua kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara terkait Kepala Distrik yang membawa Kotak Suara dari Distrik Kanggime di Tolikara
PK.34 -30	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Paniai
PK.34 -31	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -32	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Dogiayi
PK.34 -33	Formulir Model DC1 DPD Provinsi Papua
PK.34 -34	Formulir DB1 PPWP, Formulir DB1 DPR RI, Formulir DB1 DPD, Formulir DB1 DPRP dan Formulir DB1 DPRD Kabupaten Keerom
PK.34 -35	Formulir DB1 PPWP, Formulir DB1 DPR, Formulir DB1 DPD dan Formulir DB1 DPRD Kabupaten Yahukimo
PK.34 -36	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk penyandingan data Kabupaten Yahukimo
PK.34 -37	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

PK.34 -38	Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten Jayawijaya
PK.34 -39	Status Laporan Bawaslu Provinsi Papua terkait Kepala Distrik yang membawa Kotak Suara dari Distrik Kanggime di Tolikara
PK.34 -40	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -41	Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten Tolikara
PK.34 -42	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -43	Berita Acara KPU Provinsi Papua tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019
PK.34 -44	Tindak Lanjut unruk Laporan Sdr Hosea Genongga
<b>KABUPATEN JAYAPURA</b>	
PK.34.1 -1	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019
PK.34.1 -2	Surat Jawaban KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 83/kpu kab/030.659733/IV/2019
PK.34.1-4	Form A Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
PK.34.1-5	Form alat kerja pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-6	Berita Acara Nomor 47/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani);
PK.34.1-7	C1 TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-8	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-9	C1 TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;

PK.34.1-10	Form A Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-11	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-12	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 13 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-13	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Hinekombe;
PK.34.1-14	Form A Pengawasan Pengawas TPS 25 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-15	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 15 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-16	Form A Pengawasan Pengawas TPS 31 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-17	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 33 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-18	Form A Pengawasan Pengawas TPS 34 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-19	1 (satu) lembar C6 atas nama Aillen J.R. Awes;
PK.34.1-20	Form A Pengawasan Pengawas TPS 40 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-21	2 (dua) lembar C6 atas nama Abdullah dan Suffaryati;
PK.34.1-22	Form A Pengawasan Pengawas TPS 41 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-23	Form A Pengawasan Pengawas TPS 46 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-24	Form A Pengawasan Pengawas TPS 54 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-25	1 (satu) lembar C6 atas nama Ones Wepesa;
PK.34.1-26	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 58 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;



PK.34.1-27	Form A Pengawasan Pengawas TPS 60 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-28	Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-29	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani;
PK.34.1-30	Berita Acara Nomor 44/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani);
PK.34.1-31	C1 TPS 13 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-32	Form A Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-33	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-34	C1 TPS 16 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-35	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 20 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-36	Form A Pengawasan Pengawas TPS 25 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-37	Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Hobong Distrik Sentani;
PK.34.1-38	Form A Pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Sereh Distrik Sentani;
PK.34.1-39	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kampung Sereh Kecamatan Sentani;
PK.34.1-40	Berita Acara Nomor 46/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kampung Sereh Distrik Sentani);
PK.34.1-41	Form A Pengawas TPS 01 Kampung Yahim Distrik Sentani;
PK.34.1-42	31 (tiga puluh satu) lembar C6;

PK.34.1-43	04/TM/PU/33.05/ BWS-Kab.JPR/IV/2019 . tanggal 17 April 2019;
PK.34.1-44	39 (tiga puluh Sembilan) lembar C6;
PK.34.1-45	27 (dua puluh tujuh) lembar C6;
PK.34.1-46	Form Temuan Nomor 03/TM/PU/33.05/BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019;
PK.34.1-47	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Kemtuk Gresi;
<b>KABUPATEN NABIRE</b>	
PK.34.2 -1	Formulir Model C1-KPU DPRD TPS 01 Kampung Wami Distrik Yaur
PK.34.2 -2	Formulir Model C1-KPU DPRD TPS 02 Kampung Wami Distrik Yaur
PK.34.2 -3	Formulir Model C1-KPU DPRD TPS 03 Kampung Wami Distrik Yaur
PK.34.2 -4	Form A Pengawasan Panwas Distrik Yaur Pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.2 -5	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Yaur
PK.34.2 -6	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Dipa
PK.34.2 -7	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Makimi
PK.34.2 -8	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Nabire
PK.34.2 -9	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Menou
PK.34.2 -10	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kimi
PK.34.2 -11	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Nabire
PK.34.2 -12	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten
PK.34.2 -13	Surat Rekomendasi Panwas Distrik Nabire Nomor : 07/HK.05/PWSL-NBR/2019.
PK.34.2 -14	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Nabire

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	
PK.34.3 -1	C1 DPRD Kab Kampung Tarau TPS 1,5,6,7,8,11,12,13,16,20, 25,28 dan TPS 30
PK.34.3 -2	C1 DPRD kab TPS 2 kamp. Barawaikap, TPS 14 Kel. Serui Kota, TPS 11, 20, 25, 28 dan 30 Kel. Tarau
PK.34.3 -3	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Angkaisera
PK.34.3 -4	Surat Bawaslu Kabupaten Yapen Nomor : 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019
PK.34.3 -5	Surat Bawaslu Kabupaten Yapen Nomor : 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019
PK.34.3 -6	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yapen Nomor : 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019
PK.34.3 -7	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Anotaurei
PK.34.3 -8	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Kepulauan Ambai
PK.34.3 -9	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Kosiwo
PK.34.3 -10	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Teluk Ampimoi
PK.34.3 -11	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Yapen Timur
PK.34.3 -12	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Yapen Barat
PK.34.3 -13	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Yapen Selatan
PK.34.3 -14	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yapen Nomor : 359/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019
PK.34.3 -15	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten
PK.34.3 -16	Formulir DB1 DPR Provinsi Papua Kabupaten Kepulauan Yapen Setelah Panyandingan Data
PK.34.3 -17	Rekaman Audio Visual Tentang Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten

PK.34.3 -18	Surat Rekomendasi Bawaslu Kepulauan Yapen terhadap KPU Provinsi Papua untuk memberikan sanksi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
PK.34.3 -19	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Yawakukat
PK.34.3 -20	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Wonawa
PK.34.3 -21	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Poom
PK.34.3 -23	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Yerui
PK.34.3 -24	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Windesi
PK.34.3 -25	Surat KPU Kabupaten Yapen Nomor: 126/pp.05.1/9105/KPU-KAB/V/2019
PK.34.3 -26	Tanta Terima Laporan dari Peserta Pemilu: Hanura, PDIP, PSI, Gerindra, dan Perindo
PK.34.3 -27	Undangan Klarifikasi ke KPU Yapen
<b>KABUPATEN BIAK NUMFOR</b>	
PK.34.4-1	Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Biak Kota (Form Model A)
PK.34.4-2	Form Model DA1-DPR dan DA1-DPRP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Biak Kota
PK.34.4-3	Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Samofa (Form Model A)
PK.34.4-4	Form Model DA1-DPR dan DA1-DPRP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Samofa
PK.34.4-5	Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Biak Kota (Form Model A)
PK.34.4-6	Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor (Form Model A) (Lampiran Form Model ..... Keberatan Bawaslu Biak Numfor
PK.34.4-7	Surat Rekomendasi PSU Nomor: .....

PK.34.4-8	Form Model DB1-DPR dan DB1-DPRP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Biak Numfor
<b>KABUPATEN PUNCAK JAYA</b>	
PK.34.5 -1	Formulir C1-KPU DPRP se-Distrik Yamoneri
PK.34.5 -2	Formulir C1-KPU DPRP se-Distrik Mulia
PK.34.5 -3	Formulir C1-KPU DPRP se-Distrik Nioga
PK.34.5 -4	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Irimuli
PK.34.5 -5	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Gurage
PK.34.5 -6	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Tingginambut
PK.34.5 -7	Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Dapil 3 Distrik Tingginambut
PK.34.5 -8	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Dokome
PK.34.5 -9	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mulia
PK.34.5 -10	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Waegi
<b>KABUPATEN PANIAI</b>	
PK.34.6 -1	Form A Pengawasan Panwaslu Desa/Kampung se-Distrik Paniai
PK.34.6 -2	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -3	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Yagai
PK.34.6 -4	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Kebo
PK.34.6 -5	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Topiyai
PK.34.6 -6	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Yatamo
PK.34.6 -7	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Ekadidie
PK.34.6 -8	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Wegebino
PK.34.6 -9	Formulir Model DAA1 Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -10	Formulir Model DAA1 Kampung Aikai Distrik Paniai Timur

PK.34.6 -1	Formulir Model DAA1 Kampung Madi Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -2	Formulir Model DAA1 Kampung Ipakiye Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -3	Formulir Model DAA1 Kampung Papato Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -4	Formulir Model DAA1 Kampung Timida Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -5	Formulir Model DAA1 Kampung Amaogi Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -6	Formulir Model DAA1 Kampung Kopo Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -7	Formulir Model DAA1 Kampung Wouyebutu Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -8	Formulir Model DAA1 Kampung Awabutu Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -9	Formulir Model DAA1 Kampung Uwibutu Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -10	Formulir Model DAA1 Kampung Pudotadi Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -11	Formulir Model DAA1 Kampung Iyaitaka Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -12	Formulir Model DAA1 Kampung Ugibutu Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -13	Formulir Model DAA1 Kampung Kogekotu Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -14	Formulir Model DAA1 Kampung Ekeitadi Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -15	Formulir Model DAA1 Kampung Dupia Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -16	Formulir Model DAA1 Kampung Todia Distrik Siriwo
PK.34.6 -17	Formulir Model DAA1 Kampung Dadou Distrik Siriwo

PK.34.6 -18	Formulir Model DAA1 Kampung Bua Distrik Siriwo
PK.34.6 -19	Formulir Model DAA1 Kampung Nomokepota Distrik Siriwo
PK.34.6 -20	Formulir Model DAA1 Kampung Kepi Distrik Siriwo
PK.34.6 -21	Formulir Model DAA1 Kampung Dogomouta Distrik Siriwo
PK.34.6 -22	Formulir Model DAA1 Kampung Bugubutu Distrik Siriwo
PK.34.6 -23	Formulir Model DAA1 Kampung Eugai Distrik Siriwo
PK.34.6 -24	Formulir Model DAA1 Kampung Degetadi Distrik Siriwo
PK.34.6 -25	Formulir Model DAA1 Kampung Uwoyupi Distrik Siriwo
PK.34.6 -26	Formulir Model DAA1 Kampung Wegekebo Distrik Siriwo
PK.34.6 -27	Formulir Model DAA1 Kampung Yinotadi Distrik Siriwo
PK.34.6 -28	Formulir Model DAA1 Kampung Ibumomaida Distrik Kebo
PK.34.6 -29	Formulir Model DAA1 Kampung Ayaigo Distrik Kebo
PK.34.6 -30	Formulir Model DAA1 Kampung Kebo II Distrik Kebo
PK.34.6 -31	Formulir Model DAA1 Kampung Togowa Distrik Kebo
PK.34.6 -32	Formulir Model DAA1 Kampung Yokagadagi Distrik Kebo
PK.34.6 -33	Formulir Model DAA1 Kampung Geibu Distrik Kebo
PK.34.6 -34	Formulir Model DAA1 Kampung Mugimeketago Distrik Kebo
PK.34.6 -35	Formulir Model DAA1 Kampung Kagupagu Distrik Kebo
PK.34.6 -36	Formulir Model DAA1 Kampung Bunaida Distrik Kebo
PK.34.6 -37	Formulir Model DAA1 Kampung Uwaiye Distrik Kebo
PK.34.6 -38	Formulir Model DAA1 Kampung Tuwamakida Distrik Kebo
kPK.34.6 -39	Formulir Model DAA1 Kampung Kebo Satu Distrik Kebo
PK.34.6 -40	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Paniai

PK.34.6 -41	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai atas Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
<b>KABUPATEN SARMI</b>	
PK.34.7 -1	Form A Hasil pengawasan Panwas Distrik Bonggo
PK.34.7 -2	Form A Pengawasan PTPS TPS 01 Kampung Surimania Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi
PK.34.7 -3	Salinan C1 Bina
PK.34.7 -4	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Apawer Hulu
<b>KABUPATEN KEEROM</b>	
PK.34.8 – 1	C1 Kampung Ampas
PK.34.8 – 2	Form A pengawasan Pengawas TPS.
PK.34.8 – 3	DAA1 Kampung Ampas
PK.34.8 - 4	Format .A Hasil Pengawasan PPL Kampung Ampas
PK.34.8 - 5	DA1 DPRD Kab/Kota
PK.34.8 - 6	Format A Pengawasan Panwas Distrik
PK.34.8-1	C1 Kampung Dubu
PK.34.8-2	C1 Kampung Umuaf TPS 01
PK.34.8-3	C1 Kampung Umuaf TPS 02
PK.34.8-4	C1 Kampung Embi
PK.34.8-5	C1 Kampung Semografi TPS 01
PK.34.8-6	C1 Kampung Semografi TPS 02
PK.34.8-7	C1 Kampung Tatakra
PK.34.8-8	Format A Pengawasan Panwas Distrik Web
PK.34.8-9	DA1 DPRD Kab/Kota
PK.34.8-10	Format APengawasan Bawaslu Keerom
PK.34.8 - 16	Formulir DB1 PPWP, DPR, DPD Provinsi
<b>KABUPATEN WAROPEN</b>	
PK.34.9 -1	Formulir Model DA1 Distrik Masirei
PK.34.9 -2	Formulir Model DA1 Distrik Demba



PK.34.9 -3	Formulir Model DA1 Distrik Wonti
PK.34.9 -4	Formulir Model DA1 Distrik Soyoi Mambai
PK.34.9 -5	Formulir model DB1 Kabupaten Waropen
<b>KABUPATEN MAPPI</b>	
PK.34.10 -1	Form A Pengawasan Panwas Distrik Minyamur untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.10 -2	Form A Pengawasan Panwas Distrik Passue untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.10 -3	Form A Pengawasan Panwas Distrik Haju untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.10 -4	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.10 -5	Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Mappi
PK.34.10 -6	Formulir Model DB1 DPR Provinsi Kabupaten Mappi
<b>KABUPATEN SUPIORI</b>	
PK 34.11-01	Format A Pengawasan Supervise Pemungutan dan Perhitungan Suara Panwas Distrik Supiori Barat pada tanggal 17 April 2019
PK 34.11-02	Format A Pengawasan Supervise Pemungutan dan Perhitungan Suara Panwas Distrik Supiori Utara pada tanggal 17 April 2019
PK 34.11-03	Format A Pengawasan Supervise Pemungutan dan Perhitungan Suara Panwas Distrik Supiori Selatan pada tanggal 17 April 2019
PK 34.11-04	Format A Pengawasan Supervise Pemungutan dan Perhitungan Suara Panwas Distrik Supiori Kepulauan Aruri pada tanggal 17 April 2019

PK 34.11-05	Format A Pengawasan Supervise Pemungutan dan Perhitungan Suara Panwas Distrik Supiori Timur pada tanggal 17 April 2019
PK 34.11-06	Format A Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Supiori Barat.
PK 34.11-07	Format A Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Supiori Utara.
PK 34.11-08	Format A Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Supiori Selatan.
PK 34.11-09	Format A Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Supiori Kepulauan Aruri.
PK 34.11-10	Format A Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Supiori Timur.
PK 34.11-11	Format A Pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten oleh Bawaslu Kab Supiori.
PK 34.11-12	Format A Pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten oleh Bawaslu Kab Supiori.
PK 34.11-13	Format A Pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten oleh Bawaslu Kab Supiori.
PK 34.11-14	DA1
PK 34.11-15	DB1
PK 34.11-16	C.1
PK 34.11-17	Fom. A. Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan suara Tingkat PPL, dan PTPS
<b>KABUPATEN MAMBERAMO RAYA</b>	
PK.34.12 -1	Surat Rekomendasi Panwas Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Tengah untuk PSU nomor: 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019

PK.34.12 -2	Surat Rekomendasi Panwas Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Tengah untuk PSU nomor: 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019
<b>KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH</b>	
PK.34.13 -1	Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah
PK.34.13 -2	DB1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah
PK.34.13 -3	DAA1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah se-Distrik Kelila
Pk.34.13-4	DA1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Distrik Megambilis
Pk.34.13-5	DAA1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah se-Distrik Megambilis
Pk.34.13-6	DB1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah
<b>KABUPATEN YALIMO</b>	
PK.34.14 -1	Form A Pengawasan Supervisi Panwas Distrik Abenaho pada Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho
PK.34.14 -2	Video keributan yang terjadi di TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho
PK.34.14 -3	Form A Pengawasan Panwas Distrik Abenaho pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo
PK.34.14 -4	Formulir model C1 TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho yang dibacakan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo

PK.34.14 -5	DA1-DPRD Dapil III Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo
PK.34.14 -6	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Yalimo
PK.34.14 -7	Surat Penelusuran Dugaan Pelanggaran Panwas Distrik Abenaho No:001/PNWS/DIST.ABNH/IV/2019 tanggal 27 April 2019
PK.34.14 -8	DB1-DPRD Dapil III Kabupaten Yalimo
<b>KABUPATEN LANNY JAYA</b>	
PK.34.15 -1	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Melagi Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -2	Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -3	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya untuk Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.15 -4	Form A Pengawasan Panwas Distrik Gupura untuk Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -5	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Gupura Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -6	Formulir Model C1-KPU DPR RI se-Distrik Muara, Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -7	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Poga Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -8	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -9	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Muara Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -10	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Gubume Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -11	Formulir Model DA1 DPRP Distrik Gupura Kabupaten Lanny Jaya

PK.34.15 -12	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Poga Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -13	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Muara Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -14	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Karu Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -15	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Ninime
PK.34.15 -16	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Malagai Neri
PK.34.15 -17	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Tiom
PK.34.15 -18	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Goa Balim
PK.34.15 -19	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kolawa
PK.34.15 -20	Form A Pengawasan Panwas Distrik Nogi terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -21	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Nogi
PK.34.15 -22	Form A Pengawasan Panwas Distrik Tiom terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -23	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Tiom
PK.34.15 -24	Form A Pengawasan Panwas Distrik Niname terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -25	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Niname
PK.34.15 -26	Form A Pengawasan Panwas Distrik Yugungwi terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -27	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Yugungwi
PK.34.15 -28	Tanda Terima Atas Laporan Iriana Wenda dengan nomor 23/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.PAV/2019
PK.34.15 -29	Kajian Awal Atas Laporan Iriana Wenda
PK.34.15 -30	Status Laporan Nomor :75/HM/Bawaslu.Kab.LJ/V/2019
PK.34.15 -31	Form A Pengawasan Panwas Distrik Gelok Beam terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -32	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Gelok Beam

PK.34.15 -33	Form A Pengawasan Panwas Distrik Bruwa terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -34	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Bruwa
<b>KABUPATEN PUNCAK</b>	
PK.34.17 -1	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten
PK.34.17 -2	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor: 36/RPU/23/Kab/Puncak/V/2019
PK.34.17 -3	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak terkait tindak lanjut KPU Kabupaten Puncak untuk Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor: 36/RPU/23/Kab/Puncak/V/2019
PK.34.17 -4	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten
PK.34.17 -5	Form A Pengawasan Panwas Distrik Amungkalpia dan Distrik Binna tahapan Pemungutan dan Perhitungan Pemilu Tahun 2019
PK.34.17 -6	Formulir DA1 Distrik Ilaga Utara, Distrik Amungkalpia dan Distrik Gome Utara
PK.34.17 -7	Form A Pengawasan Panwas Distrik untuk tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik
PK.34.17 -8	Fomulir Model DB1 DPRD Kabupaten Punca
<b>KABUPATEN DOGIAYI</b>	
PK.34.18 -1	Form A Bawaslu Kabupaten Dogiayi Terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019
PK.34.18 -2	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Dogiayi
PK.34.18 -3	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kamu Utara
PK.34.18 -4	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kamu Selatan

PK.34.18 -5	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kamu Timur
PK.34.18 -6	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mapia Tengah
PK.34.18 -7	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Dogiayi
PK.34.18 -8	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten RI Distrik Kamu Utara
PK.34.18 -9	Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Dogiayi
PK.34.18 -20	Surat Rekomendasi Bawaslu Dogiayi nomor: 006/Rek/Bws.dgy/33.27/V/2019
<b>KABUPATEN INTAN JAYA</b>	
PK.34.19 -1	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Sugapa
PK.34.19 -2	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Agisiga
PK.34.19 -3	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Hitadipa
PK.34.19 -4	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Homeo
PK.34.19 -5	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Ugimba
PK.34.19 -6	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Biandoga
PK.34.19 -7	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Tomosiga

PK.34.19 -8	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Wandai
PK.34.19 -9	Rekomendasi Bawaslu Kab.Intan Jaya tentang penandingan data untuk KPU Kab. Intan Jaya
PK.34.19 -10	Rekomendasi Bawaslu Provinsi
PK.34.19 -11	Fomr. A Pengawasan Pleno di Provinsi oleh KPU Kabupaten Intan Jaya
<b>KABUPATEN DEIAYI</b>	
PK.34.20 -1	Formulir Model DA1 Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai
PK.34.20 -2	Formulir Model DA1 Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai
PK.34.20 -3	Formulir Model DA1 Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai
PK.34.20 -4	Formulir Model DA1 Distrik Kapiroya, Kabupaten Deiyai
PK.34.20 -5	Formulir Model DA1 Distrik Kapiroya, Kabupaten Deiyai Bouwobado
PK.34.20 -6	Formulir Model DB1 Kabupaten Deiyai
PK.34.20 -7	Form A Pengawasan Panwas Distrik Boubado terhadap Distribusi Logistik Pemilu di Distrik Bowobado Pada Tanggal 17 April 2019
PK.34.20 -8	Form A Pengawasan Panwas Distrik Boubado terhadap Distribusi Logistik Pemilu di Distrik Bowobado Pada Tanggal 9 April 2019
PK.34.20 -9	Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten se-Distrik Boubado
PK.34.20 -10	Form A Pengawasan Panwas Distrik Boubado terhadap Distribusi Logistik Pemilu di Distrik Bowobado Pada Tanggal 19 April 2019
PK.34.20 -11	Form A Pengawasan Panwas Distrik Boubado terhadap Pergeseran Logistik Pemilu ke Kantor KPUD di Distrik Bowobado



PK.34.20 -12	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.20 -13	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai untuk pemungutan suara di Distrik Boubado
PK.34.20 -14	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten ada tanggal 4 Mei 2019
PK.34.20 -15	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.20 -16	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas Pemungutan Suara Susulan di Distrik Baoubado
PK.34.20 -17	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas Perhitungan Suara Susulan di Distrik Baoubado
<b>KOTA JAYAPURA</b>	
Bukti PK.34.21-1	Form A. Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 46/LHP/PM.31.01/IV/2019, tanggal 18 April 2019
Bukti PK.34.21-2	BA Nomor 40/BA/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019 Tentang Keterlambatan Distribusi Logistik Ke Tempat Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Bukti PK.34.21-3	Kronologis Keterlambatan Logistik tanggal 17 April 2019
Bukti PK.34.21-4	Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 278/K.Bawaslu-Kota.JPR/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan, tertanggal 17 April 2019

Bukti PK.34.21-5	BA Nomor 41/BA/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Susulan di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Bukti PK.34.21-6	Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.1/LHP/PM.31.01/IV/2019, tanggal 20 April 2019
Bukti PK.34.21-7	Surat Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram pada tanggal 16 Mei 2019.
Bukti PK.34.21-8	Surat Rekomendasi Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Abepura pada tanggal 16 Mei 2019.
Bukti PK.34.21-9	Surat Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 16 Mei 2019.
Bukti PK.34.21-10	Surat Rekomendasi Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Utara pada tanggal 16 Mei 2019.

Bukti PK.34.21-11	Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 323/K.Bawaslu-Kota.JPR/IV/2019 Perihal Saran Perbaikan, tertanggal 19 April 2019
Bukti PK.34.21-12	Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.4/LHP/PM.31.01/V/2019, tanggal 20 Mei 2019
Bukti PK.34.21-13	Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura Utara
Bukti PK.34.21-14	Berita Acara Nomor 60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Jayapura Pemilihan Umum tahun 2019
Bukti PK.34.21-15	Model DB1-KPU (Dapil Kota Jayapura 2)
Bukti PK.34.21-16	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-17	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan FOrmulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama A. Rilyke M. Muabuay
Bukti PK.34.21-18	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama A. Rilyke M. Muabuay
Bukti PK.34.21-19	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Zubaidah
Bukti PK.34.21-20	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Zubaidah
Bukti PK.34.21-21	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Zubaidah

Bukti PK.34.21-22	Form A. Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.3/LHP/PM.31.01/V/2019, tanggal 20 Mei 2019
Bukti PK.34.21-23	Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura Selatan
Bukti PK.34.21-24	Model DB1-KPU (Dapil Kota Jayapura 1)
Bukti PK.34.21-25	Berita Acara Nomor: 57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V2019 tentang Sinkronisasi data sertifikasi dan hasil perhitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan
Bukti PK.34.21-26	Surat Rekomendasi nomor: 305/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang Rekomendasi untuk membuka C1 Plano.
Bukti PK.34.21-27	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 15 Mei 2019 atasnama H. Abdul Rajab (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-28	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 Mei 2019 atasnama Bernard M. Rumkorem (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-29	Model Formulir B1 Penerimaan dan Model Formulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Junaedi Rahim
Bukti PK.34.21-30	Model Formulir B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Junaedi Rahim

Bukti PK.34.21-31	Model Formulir B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Junaedi Rahim
Bukti PK.34.21-32	Model Formulir B1 Penerimaan Laporan dan Model Formulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Andre W. Fonataba
Bukti PK.34.21-33	Model Formulir B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Andre W. Fonataba
Bukti PK.34.21-34	Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Heram
Bukti PK.34.21-35	Model DB1-KPU Kota (Dapil Kota Jayapura III)
Bukti PK.34.21-36	Model DA1 PPWP, Model DA1 DPR, Model DA1 DPD, Model DA1 DPRD dan Model DA1 Kabupaten/Kota pada tingkat Distrik Heram.
Bukti PK.34.21-37	Sertifikasi Perhitungan Suara Calon DPR
Bukti PK.34.21-38	Sertifikasi Perhitungan Suara Calon DPRD Kab/Kota
Bukti PK.34.21-39	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-40	Model Formulir B1 Penerimaan Laporan dan Model Formulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Ferry S.H.
Bukti PK.34.21-41	Model Formulir B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Ferry S.H.
Bukti PK.34.21-42	Model Formulir B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Ferry S.H.

Bukti PK.34.21-43	Model Formulir B1 Penerimaan Laporan dan Model Formulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Welson Airon Wonda
Bukti PK.34.21-44	Model Formulir B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Welson Airon Wonda
Bukti PK.34.21-45	Model Formulir B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Welson Airon Wonda
Bukti PK.34.21-46	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-47	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-48	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Hadirat S. Zega
Bukti PK.34.21-49	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Hadirat S. Zega
Bukti PK.34.21-50	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Hadirat S. Zega
Bukti PK.34.21-51	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil Kota Jayapura II atasnama Simon P. Latue (Model DB2-KPU)

Bukti PK.34.21-52	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil Kota Jayapura I atasnama Simon P. Latue (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-53	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atasnama Riko F. Walubun (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-54	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formuli Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Safrudin
Bukti PK.34.21-55	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Safrudin
Bukti PK.34.21-56	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Safrudin
Bukti PK.34.21-57	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Bani Tabuni
Bukti PK.34.21-58	Surat Pelimpahan Laporan Pelanggaran dari Bawaslu Provinsi dengan nomor: 153/K.Bawaslu- Prov.Pa/PM.06.01
Bukti PK.34.21-59	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Bani Tabuni
Bukti PK.34.21-60	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Bani Tabuni
Bukti PK.34.21-61	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

	Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atasnama Ardon E. Nauw (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-62	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atasnama Otis Deda (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-63	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Simon Petrus Bame
Bukti PK.34.21-64	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Simon Petrus Bame
Bukti PK.34.21-65	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Simon Petrus Bame
Bukti PK.34.21-66	Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.2/LHP/PM.31.01/IV/2019, tanggal 20 April 2019
Bukti PK.34.21-67	Surat Rekomendasi Nomor 027/LV/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram pada tanggal 16 Mei 2019.
Bukti PK.34.21-68	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Sely Wanimbo
Bukti PK.34.21-69	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Sely Wanimbo



Bukti PK.34.21-70	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Sely Wanimbo
Bukti PK.34.21-71	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atasnama Ali Parawawan (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-72	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Fransisco Ardamis
Bukti PK.34.21-73	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Fransisco Ardamis
Bukti PK.34.21-74	Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Abepura
Bukti PK.34.21-75	Model DB1-KPU Dapil Kota Jayapura IV
Bukti PK.34.21-76	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Buni Yikwa
Bukti PK.34.21-77	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Buni Yikwa
Bukti PK.34.21-78	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Buni Yikwa
Bukti PK.34.21-79	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Jimmy Emanuel Siep
Bukti PK.34.21-80	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Jimmy Emanuel Siep

Bukti PK.34.21-81	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Jimmy Emanuel Siep
Bukti PK.34.21-82	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atasnama Saksi Partai Solidaritas Indonesia (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-83	Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Kampante Pemilihan Umum serentah Tahun 2019 yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-84	Dokumentasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Bukti PK.34.21-85	Dokumentasi Deklarasi Pemilu Damai
Bukti PK.34.21-86	Surat nomor: <b>174/K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/X/2018</b> Perihal Ronda Bawaslu Jaga Hak Pilih yang ditujukan kepada Pengelolah Pusat Perbelanjaan di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-87	Surat nomor: 175/K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/IX/2018 Perihal Ronda Bawaslu Jaga Hak Pilih yang ditujukan kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-88	Surat nomor: ...../K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/XI/2018 Perihal Tindak Lanjut Ronda Bawaslu Kota Jayapura yang diajukan kepada Peneglolah Pasar Tradisional Di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-89	Surat nomor: ...../K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/XI/2018 Perihal Tindak Lanjut Ronda Bawaslu Kota Jayapura yang diajukan kepada Pengelolah Supermarket di Kota Jayapura

Bukti PK.34.21-90	Surat nomor: ...../K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/XI/2018 Perihal Tindak Lanjut Pencermatan DPTHP-2 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-91	Surat nomor: 181/K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/XI/2018 Perihal Hasil Ronda Bawaslu Jaga Hak Pilih
Bukti PK.34.21-92	Surat nomor: 182/K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/XI/2018 Perihal Koordinasi DPTHP-1 dan Ronda Bawaslu Jaga Hak Pilih yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua
Bukti PK.34.21-93	Dokumentasi Foto Ronda Bawaslu Jaga Hak Pillih di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-94	Dokumentasi Deklarasi Pemilu Damai, Bersih dan Bermartabat yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Papua
Bukti PK.34.21-95	Dokumentasi Jambore Pengawasan Partisipatif Pemuda Lintas Iman yang dilaksanakan oleh Provinsi Papua
Bukti PK.34.21-96	Kerangka Acuan Lokakarya Kampanye Pencegahan Konflik Berbasis IT
Bukti PK.34.21-97	Dokumentasi Foto "Ngopi JAHE" bersama BEM dan OKP se-Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-98	Dokumentasi Foto "Ngopi JAHE" bersama Pegiat Media Alternatif di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-99	Dokumentasi Foto "Ngopi JAHE" bersama Aktivis Perempuan Papua di Kota Jayapura

Bukti PK.34.21-100	Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dengan STIH Ummel Mandiri Jayapura tentang Kerja sama Dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bukti PK.34.21-101	Dokumentasi Foto Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dan STIH Umel Mandiri
Bukti PK.34.21-102	Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dengan Universitas Cenderawasih tentang Kerja sama Dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bukti PK.34.21-103	Dokumentasi Foto Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dan Universitas Cenderawasih
Bukti PK.34.21-104	Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dengan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura tentang Kerja sama Dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bukti PK.34.21-105	Dokumentasi Foto Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Bukti PK.34.21-106	Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dengan Sekolah Tinggi Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Silas Papare Jayapura tentang Kerja sama Dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bukti PK.34.21-107	Dokumentasi Foto Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dan Sekolah Tinggi Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Silas Papare Jayapura
Bukti PK.34.21-108	Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Papua tentang Kerja sama Dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bukti PK.34.21-109	Dokumentasi Foto Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Papua
Bukti PK.34.21-110	Surat Permohonan Pemateri dan Kerangka Acuan Kegiatan "Workshop Peningkatan Peran Perempuan Orang Asli Papua dan Pengambilan Keputusan" yang Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-111	Surat nomor: 239/K.Bawaslu-Kota.JPR/III/2019 tentang Undangan Pencanangan Abepura Sebagai Distrik Tolak Politik dan Tolak Politik Uang yang

	ditujukan kepada Ketua dan Anggota Koalisi Kampus Untuk Pemilu Berkualitas di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-112	Dokumentasi Deklarasi Abepura Sebagai Distrik Tolak GOLPUT dan Tolak Politik Uang Bersama Ketua Bawaslu RI
Bukti PK.34.21-113	Dokumentasi Rapat Koordinasi Pembahasan Iklan Kampanye dan Jadwal Kampanye Rapat Umum oleh KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-114	Dokumentasi Rapat Sosialisasi Kampanye Iklan dan Media
Bukti PK.34.21-115	Surat nomor: 263/K.Bawaslu-Kota.JYP/IV/2019 perihal: Undangan Sosialisasi yang ditujukan kepada Ketua Komunitas Difabel Provinsi Papua
Bukti PK.34.21-116	Dokumentasi Sosialisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas dan Pengawasan Partisipatif Bersama Komunitas Difabel Papua
Bukti PK.34.21-117	Dokumentasi Foto dan Flyer Sosialisasi Tolak Politik Uang dan Tolak Golput Melalui Selebaran Pada Masyarakat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-118	Surat Undangan dari KPU Kota Jayapura kepada Bawaslu Kota Jayapura dengan nomor: 095.1/UND-KPU/030.434279/IV/2019 perihal: Undangan Memberikan Materi pada Bimbingan Teknis LPPDK
Bukti PK.34.21-119	Dokumentasi Foto Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk Generasi Milenial Bersama Koalisi Kampus
Bukti PK.34.21-120	Surat tertanggal 17 Juli 2018 dengan nomor: 135/K.Panwas-Kota.JPR/VII/2018 perihal: Permintaan

	Data Salinan DPS Pada Pelaksanaan PILEG dan PILPRES yang ditujukan kepada KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-121	Surat tertanggal 25 Juli 2018 dengan nomor: 139/K.Panwas-Kota.JPR/VII/2018 perihal: Himbauan Pencetakan E-KTP Sebagai Syarat Pemilihan Umum 2019 yang ditujukan kepada Walikota Jayapura Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-122	Surat tertanggal 20 Agustus 2018 dengan nomor: 145/k.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/VIII/208 perihal: Pengawasan Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Jayapura yang ditujukan kepada KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-123	Berita Acara nomor: 121/BA/KPU/030.434279/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2019
Bukti PK.34.21-124	A.3.1-KPU "Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura
	Surat tertanggal 17 September 2018 dengan nomor: 161/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/IX/2018 perihal
Bukti PK.34.21-125	Permintaan Data Potensial Pemilih Kota Jayapura Pada Pemilu Tahun 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jayapura

Bukti PK.34.21-126	surat tertanggal 27 Agustus 2018 dengan nomor: 153/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/VIII/2018 perihal: Permintaan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Jayapura yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-127	surat tertanggal 29 Agustus 2018 dengan nomor: 156/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/VIII/2018 perihal: Surat Ke-2 (kedua) Data Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pelaksanaan PILEG dan PILPRES yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-128	Surat tertanggal 1 Oktober 2018 dengan nomor: 168/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/X/2018 perihal: Pencermatan DPT yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-129	Dokumentasi Foto Sinkronisasi DPTH P Antara Bawaslu Kota Jayapura dan KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-130	Rilis Bawaslu Kota Jayapura tentang "DPT Ganda dan Ronda Bawaslu Kota Jayapura"
Bukti PK.34.21-131	Form Model A: Laporan Pengawas Pemilu tertanggal 10 Desember 2018 dalam rangka Pengawasan Melekat dan Pengawasan Dokumen Terhadap DPTH P-2 Kota Jayapura pada Pemilu 2019
Bukti PK.34.21-132	Dokumentasi Foto Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan DPTH P-2 Kota Jayapura Untuk Pemilu 2019



Bukti PK.34.21-133	Form Model A: Laporan Pengawas Pemilu tertanggal 17 Februari 2019 Februari 17 dalam rangka Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan
Bukti PK.34.21-134	Surat tertanggal 22 November 2018 dengan nomor: 183/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/XI/2018 perihal Tindak Lanjut Pencermatan DPTHP-2 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-135	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 22 Maret 2019 yang berkaitan dengan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Tahap 2 (DPTb-2).
Bukti PK.34.21-136	Dokumentasi Foto Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Kota Jayapura untuk Pemilu 2019
Bukti PK.34.21-137	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 12 Maret 2019 yang berkaitan dengan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Tahap 3 (DPTb-3).
Bukti PK.34.21-138	Surat tertanggal 28 Agustus 2018 dengan nomor: 154/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/VIII/2018 perihal Pemberitahuan tentang Aturan dan Larangan-larangan Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2019 yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkatan Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-139	Surat tertanggal 12 September 2018 dengan nomor: 158/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/IX/2018 perihal Larangan untuk Tidak Melakukan Kampanye di Luar Jadwal dan Permintaan untuk Menurunkan Atribut

	Partai di Luar Sekretariat Partai yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkatan Kota Jayapura
Bukti PK.34.21- 140	Surat tertanggal 22 September 2018 dengan nomor: 164/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/IX/2018 perihal Pendaftaran Tim Kampanyee dan Akun Media Sosial Partai Politik Peserta Pemilu yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkatan Kota Jayapura
Bukti PK.34.21- 141	Surat tertanggal 17 Oktober 2018 dengan nomor: 173/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/X/2018 perihal Permintaan Salinan Tembusan Pendaftaran Tim Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye Pemilu yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkatan Kota Jayapura dan Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPD Kota Jayapura
Bukti PK.34.21- 142	Surat tertanggal 06 November 2018 dengan nomor: 177/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/XI/2018 perihal Himbauan Pemasangan APK dan BK Pada tempat yang sudah ditetapkan yang ditujukan kepada Seluruh Tim Kampanye Partai Politik
Bukti PK.34.21- 143	Surat tertanggal 08 November 2018 dengan nomor: 180/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/XI/2018 perihal Koordinasi Mengenai Penertiban APK dan BK yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Jayapura
Bukti PK.34.21- 144	Surat tertanggal 28 November 2018 dengan nomor: 190/K.Bawaslu.Kota-JPR/04/XI/2018 perihal Permintaan Data Jumlah APK untuk Setiap Partai Politik yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kota Jayapura

Bukti PK.34.21-145	Surat tertanggal 28 November 2018 dengan nomor: 192/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/XI/2018 perihal Pemberitahuan Pemasangan APK Pada Tempat Yang Sudah Ditetapkan yang ditujukan kepada Tim Kampanye Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-146	Surat tertanggal 18 Desember 2018 dengan nomor: 199/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/XII/2018 perihal Himbauan Penertiban APK di Luar Zona Kampanye yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-147	Surat tertanggal 14 Januari 2019 dengan nomor: 202/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/I/2019 perihal Rekomendasi Penertiban APK dan BK yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-148	Surat tertanggal 12 Februari 2019 dengan nomor: 210/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/II/2019 perihal Penertiban APK yang Melanggar Aturan yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-149	Surat tertanggal 13 Februari 2019 dengan nomor: 215/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/II/2019 perihal Larangan Kampanye Di Tempat Ibadah yang ditujukan kepada Badan Pengurus Klasis GKI Sentani
Bukti PK.34.21-150	Surat tertanggal 18 Februari 2019 dengan nomor: 219/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/II/2019 perihal Larangan Kampanye Di Rumah Sakit dan Tempat Pelayanan Kesehatan yang ditujukan kepada Badan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura

Bukti PK.34.21-151	Surat tertanggal 18 Februari 2019 dengan nomor: 220/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/II/2019 perihal Larangan Kampanye Lembaga Pendidikan (Gedung Atau Sekolah) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-152	Surat tertanggal 26 Februari 2019 dengan nomor: 225/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/II/2019 perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye Se-Kota Jayapura yang ditujukan kepada 1). Kepala Satpol PP Kota Jayapura dan 2). Ka. Polres Jayapura Kota
Bukti PK.34.21-153	Surat tertanggal 7 Maret 2019 dengan nomor: 231/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/III/2019 perihal Pemberitahuan Tentang Aturan dan Larangan Kampanye yang ditujukan kepada 1). Tim Kampanye Calon Presiden RI dan Wakil Presiden RI Tingkat Kota Jayapura; 2). Tim Kampanye Partai Politik/Calon Anggota DPRD Tingkat Kota Jayapura dan 3). Tim Kampanye Calon Anggota DPD Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-154	Surat tertanggal 30 Maret 2019 dengan nomor: 250/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Tanggapan Atas Surat DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Jayapura yang ditujukan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-155	Surat tertanggal 30 Maret 2019 dengan nomor: 252/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Pemberitahuan Tentang Aturan dan Larangan Kampanye Bagi Walikota dan Wakil Walikota yang ditujukan kepada 1). Walikota Jayapura dan 2). Wakil Walikota Jayapura

Bukti PK.34.21-156	Surat tertanggal 30 Maret 2019 dengan nomor: 253/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Larangan Melibatkan Anak Sekolah Dalam Kampanye Rapat Umum dan Kampanye Iklan Media Pada Pemilu 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-157	Surat tertanggal 30 Maret 2019 dengan nomor: 254/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Himbauan Terkait Larangan Bagi ASN, Direksi, Komisaris, Dewan Pengurus dan Karyawan BUMD/BUMDES, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Pelaksanaan Pemilu 2019 yang ditujukan kepada Walikota Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-158	Surat tertanggal 30 Maret 2019 dengan nomor: 255/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Pemberitahuan Tentang Aturan Kampanye Rapat Umum yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-159	Surat tertanggal 12 April 2019 dengan nomor: 271/K.Bawaslu.Kota-JPR/IV/2019 perihal Penertiban APK Pada Masa Tenang yang ditujukan kepada Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-160	Surat tertanggal 12 April 2019 dengan nomor: 272/K.Bawaslu.Kota-JPR/IV/2019 perihal Larangan Pada Masa Tenang yang ditujukan kepada Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-161	Surat tertanggal 12 April 2019 dengan nomor: 273/K.Bawaslu.Kota-JPR/IV/2019 perihal Penertiban

	APK dan BK Pada Masa Tenang yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-162	Surat tertanggal 12 April 2019 dengan nomor: 274/K.Bawaslu.Kota-JPR/IV/2019 perihal Penertiban APK dan BK Pada Masa Tenang yang ditujukan kepada Kepala Polresta Jayapura Kota
Bukti PK.34.21-163	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 18 Desember 2018 yang berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu 2019
Bukti PK.34.21-164	Dokumentasi Foto Pengawasan Keberadaan Logistik Pemilu 2019 Pada Gudang Logistik Pemilu 2019 Pada Gudang Logistik KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-165	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 28 Februari 2019 yang berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu 2019; Penerimaan Surat Suara Untuk Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-166	Dokumentasi Foto Pengawasan Surat Suara Pemilu 2019 untuk Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-167	Surat tertanggal 02 Maret 2019 dengan nomor: 228/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Keamanan Surat Suara yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Selaku Ketua KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-168	Rilis Bawaslu Kota Jayapura tentang "Keamanan Pergerakan dan Pelipatan Surat Suara Pemilu 2019"
Bukti PK.34.21-169	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 10 April 2019 yang berkaitan dengan

	pengawasan Pemenuhan Surat Suara untuk Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-170	Dokumentasi Foto Pengambilan Surat Suara Di Perusahaan PT. Adi Perkasa Makassar
Bukti PK.34.21-171	Surat tertanggal 11 April 2019 dengan nomor: 269/K.Bawaslu.Kota-JPR/IV/2019 perihal Kelengkapan Logistik di TPS yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-172	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 18 April 2019 yang berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-173	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 15 April 2019 yang berkaitan dengan pengawasan Pemusnahan Surat Suara Rusak
Bukti PK.34.21-174	Dokumentasi Foto Pemusnahan Surat Suara Rusak
<b>KABUPATEN JAYAWIJAYA</b>	
PK.34.23 -1	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.23 -2	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Wadangku
PK.34.23 -3	Formulir Model DA1 DPRD Dapil 2 se-Kabupaten Jayawijaya
PK.34.23 -4	Formulir Model DB1 DPRD Dapil 2 Kabupaten Jayawijaya
PK.34.23 -5	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Labarek
PK.34.23 -6	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Pisugi

PK.34.23 -7	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Hubikiak
PK.34.23 -8	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Hubikosi
PK.34.23 -9	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Musatfak
PK.34.23 -10	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Silo Sukarno Doga
PK.34.23 -11	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Wita Waya
PK.34.23 -12	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Asologima
PK.34.23 -13	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Asotipo
PK.34.23 -14	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Jayawijaya
PK.34.23 -15	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik di Dapil 2 Jayawijaya
PK.34.23 -16	Surat Rekomendasi Bawaslu Jayawijaya Nomor: 132/K.BAWASLUJYW/PM.03.01/V/2019
PK.34.23 -17	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Wame
PK.34.23 -18	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Dapil 3
PK.34.23 -19	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Dapil 4
<b>KABUPATEN MIMIKA</b>	
PK.34.24 -1	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Baru
PK.34.24 -2	Form A Pengawasan Panwas Distrik Mimika Baru pada Tahapan Rekapitulasi di Tingkat Distrik
PK.34.24 -3	Form A Pengawasan Staf Bawaslu Kabupaten Mimika pada Tahapan Rekapitulasi di Tingkat Distrik
PK.34.24 -4	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika pada Tahapan Rekapitulasi di Tingkat Distrik
PK.34.24 -5	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Mimika



PK.34.24 -6	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Agimuga Kabupaten Mimika
PK.34.24 -7	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Alama Kabupaten Mimika
PK.34.24 -8	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Amar Kabupaten Mimika
PK.34.24 -9	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Hoya Kabupaten Mimika
PK.34.24 -10	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Iwaka Kabupaten Mimika
PK.34.24 -11	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Jila Kabupaten Mimika
PK.34.24 -12	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Jita Kabupaten Mimika
PK.34.24 -13	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika
PK.34.24 -14	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Narama Kabupaten Mimika
PK.34.24 -15	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika
PK.34.24 -16	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika
PK.34.24 -17	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika
PK.34.24 -18	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Tengah Tengah Kabupaten Mimika
PK.34.24 -19	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Timur Tengah Kabupaten Mimika
PK.34.24 -20	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Timur Jauh Tengah Kabupaten Mimika
PK.34.24 -21	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika

PK.34.24 -22	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Wania Kabupaten Mimika
PK.34.24 -23	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
<b>KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG</b>	
PK.34.25 -1	Formulir model DA1 DPR RI se-Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -2	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Okbibab Distrik Okbiba Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -3	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Oksamol Distrik Oksamol Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -4	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Okaom Distrik Okaom Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -5	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Okbab Distrik Okbab Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -6	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Aboy Distrik Aboy Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -7	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Oklap Distrik Oklap Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -8	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Serambakon Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -9	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Serambakon Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang
<b>KABUPATEN YAHUKIMO</b>	
PK.34.26 -1	Berita Acara Bawaslu Provinsi Papua Nomor:008/Bawaslu-Provinsi.BA.PD/V/2019
PK.34.26 -2	Form A Pengawasan Panwas Distrik se-Kabupaten Yahukimo terkait Rekapitulasi Tingkat Distrik
<b>KABUPATEN TOLIKARA</b>	

PK.34.27 -1	Pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Papua ke Bawaslu Kabupaten Tolikara dengan nomor : 35/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.Pa/V/2019
PK.34.27 -2	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Air Garam, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -3	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -4	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -5	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Bogonuk, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -6	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Goyage, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -7	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Geya, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -8	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Bogonuk, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -9	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Bogonuk, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -10	Form A Pengawasan Panwas Distrik Karubaga untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Distrik
PK.34.27 -11	Formulir Model DA1 DPRP Distrik Karubaga
PK.34.27 -12	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Konda
PK.34.27 -13	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Woniki
PK.34.27 -14	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Pogeneri
PK.34.27 -15	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Nabunage
PK.34.27 -16	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -17	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Egiam
PK.34.27 -18	Status Laporan atas nama Daud Kogoya

PK.34.27 -19	Form A Pengawasan Panwas Distrik Wina untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Distrik
PK.34.27 -20	Form A Pengawasan Panwas Distrik se-Kabupaten Tolikara untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Distrik
PK.34.27 -21	Pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Papua ke Bawaslu Kabupaten Tolikara dengan nomor : 129/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.PaV/2019
PK.34.27 -22	Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 23/BA/KPU-KAB.TL/IV/2019
<b>KABUPATEN BOVEN DIGOEL</b>	
PK 34.28-01	Form A Pengawasan Pembetulan DPT
<b>KABUPATEN ASMAT</b>	
PK.34.29 -1	Formulir Model DA1-KPU DPR RI Distrik Derkomour
PK.34.29 -2	Formulir Model DA1-KPU DPR RI Distrik Akat
PK.34.29 -3	Formulir Model DB1-KPU DPR RI Kabupaten Asmat
PK.34.29 -4	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat atas tahapan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.29 -5	Rekomendasi PSU
PK.34.29 -6	Formulir Model C1 DPRD Kabupaten TPS 01 dan 03 Kampung Bismam Distrik Agats
PK.34.29 -7	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Agats
PK.34.29 -8	Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Kabupaten Asmat